

KOMUNITAS TIONGHOA DALAM PERGERAKAN POLITIK INDONESIA (1926-1942)

Oleh : Sugiyarto
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip

Abstract

This research is about political study of the Chinese “Peranakan” in Indonesia, particularly in Java, but this does not mean that there is a sharp separation between the political groups of Chinese “Totok” and “Peranakan” factions. Instead there is an interaction between the two in developing nationalism encapsulated in three main political streams, namely Sin Po group oriented to China mainland, Chung Hua Hui community which oriented politically to Dutch Colonial Government, and Tionghoa Indonesia Party (PTI) which oriented to Indonesian nationalism. Nevertheless this study will focus on the half breed Chinese political movement, while political activity of the Chinese “Totok” will be discussed as far as their role in highlighting the Chinese “Peranakan” group.

Key word: the chinese “peranakan”, the chinese “totok”, chinese nationalism

1. Pendahuluan

Orang Tionghoa¹ yang ada di Indonesia, sebenarnya tidak merupakan satu kelompok yang asalnya dari satu daerah di negara Cina/Tiongkok, tetapi terdiri dari beberapa suku bangsa yang berasal dari propinsi, yaitu Fukien dan Kwantung yang terpecah daerah-daerahnya. Setiap emigran Tionghoa ke Indonesia membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Ada empat

¹ Pada umumnya orang-orang Cina di Indonesia kurang senang menyebutkan istilah Cina. Mereka lebih senang mengucapkan istilah Tionghoa. Hal semacam itu terlihat juga pada seringnya para penulis yang berasal dari orang Cina seperti buku-buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata, Melly G Tan, Beni Setiono selalu menggunakan istilah Tionghoa. Sebagai alasannya dapat dijelaskan bahwa sebab di Indonesia pernah berkembang Tionghoa Hwee Koan (berdiri pada awal abad ke-20), suatu organisasi Cina-Raya yang bertujuan memupuk kebudayaan Cina melalui pendirian sekolah-sekolah berbahasa Cina dan surat-surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa. Selain itu, bila menggunakan istilah Cina dapat diasosiasikan bahwa mereka bangsa Hunna yang mempunyai konotasi bangsa yang tidak beradab. Sebaliknya kalau memakai istilah Tionghoa, mereka mengartikan kehidupannya sudah selaras dengan aturan peradatan dinasti Chou yang dipandang baik. Lihat Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang* (Jakarta: Penerbit Keng Fo, 1961), hlm.34

bahasa Tionghoa di Indonesia, yaitu bahasa Hokkien, Hakka, Teo-Chiu dan Kwongfu/Kanton.

Para emigran Tionghoa yang tersebar ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-16 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Mereka pada awalnya adalah dari suku bangsa Hokkien dengan daerah asalnya propinsi Fukien. Pada abad k-15/16 kawasan Fukien merupakan daerah yang penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Tionghoa ke seberang lautan. Emigran Tionghoa selanjutnya adalah suku bangsa Teo-Chiu dan Hakka dari pantai selatan daratan Cina. Pusat daerah orang Teo-Chiu dan Hakka adalah dipedalaman propinsi Kwangtung yang terutama terdiri dari kawasan gunung kapur yang tandus. Kedua suku bangsa Tionghoa ini merantau karena terpesa atas kebutuhan mata pencaharian hidup. Mereka dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengeploatasi sumber-sumber mineral, sehingga poplasiya disekitar pertambangan yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. . Sekali pun demikian sejak akhir abad ke-19, orang Teo-Chiu dan Hakka mulai bermigrasi ke Jawa Barat, karena tertarik oleh perkembangan kota Batavia (Jakarta), selain dibukanya daerah Priangan bagi pedagang Tionghoa². Sementara itu, di sebelah barat daerah asal orang Hakka adalah wilayah orang Kanton (Kwongfu). Serupa dengan orang Hakka, orang Kanton terkenal di Asia Tenggara sebagai kuli pertambangan. Pada umumnya orang Kanton datang ke Indonesia dengan modal finansial besar dan modal ketrampilan teknis serta pertukangan yang tinggi.

Walaupun orang Tionghoa di Indonesia terdiri dari empat suku bangsa, namun dalam pandangan orang Indonesia pada umumnya orang Tionghoa hanya dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu Peranakan dan Totok. Penggolongan Peranakan dan Totok bukan semata-mata berdasarkan kelahiran saja, tetapi juga menyangkut tingkat penyesuaian dan akulturasi dari para Tionghoa terhadap kebudayaan yang ada di sekitarnya. Artinya orang Peranakan tidak hanya Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda/Indonesia, hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan

² Puspa Vasanty "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta; Djambatan, 1982), hlm. 347

Indonesia, sedangkan yang Totok tidak saja diartikan orang Tionghoa yang lahir di negara Cina/Tiongkok.

Kajian ini merupakan studi politik kaum Tionghoa peranakan, tetapi ini tidak berarti bahwa terdapat pemisahan yang tajam antara golongan politik Tionghoa totok dan golongan peranakan. Sebaliknya ada interaksi di antara keduanya. Sekali pun demikian fokus kajian akan terpusat pada gerakan politik golongan peranakan, sedang aktivitas politik golongan Tionghoa totok akan dibahas sejauh perannya menyorot pada golongan peranakan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk memahami dinamika pergerakan Tionghoa Peranakan di Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan di dalam penelitian ini adalah buku-buku yang secara khusus mengungkap tentang pergerakan Tionghoa Peranakan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi sumber-sumber yang dikumpulkan itu kemudian diuji secara kritis untuk memperoleh sumber-sumber sejarah yang otentik dan kredibel sehingga pada akhirnya akan diperoleh fakta sejarah. Fakta sejarah itu dianalisis ke dalam suatu uraian yang sistematis dan diletakkan dalam konteks sejarah.

3. Pembahasan

3.1. Terbentuknya Nasionalisme Tionghoa di Indonesia

Sebelum pertengahan kedua abad ke-20, orang Tionghoa di Indonesia sebagian besar terdiri dari para pedagang suku Hokkian. Sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan pengangkutan dan oleh kebijakan kekaisaran dan dinasti Ching yang pada waktu itu melarang kaum imigran Tionghoa untuk meninggalkan dan masuk kembali ke negeri Tiongkok, maka imigrasi massal ke Indonesia tidak pernah

terjadi³. Orang Tionghoa laki-laki yang sampai ke Indonesia tidak membawa keluarga mereka tetapi kemudian menikah dengan perempuan pribumi. Oleh karena itu, dalam perjalanan waktu tumbuhlah suatu komunitas Tionghoa peranakan di wilayah nusantara.

Kaum Tionghoa peranakan biasanya mempunyai darah pribumi dari garis keturunan perempuan (ibu) dan menempuh cara hidup yang sedikit mirip dengan pribumi. Kaum lelakinya memakai *theng-sha* (baju panjang Cina), sedangkan kaum perempuannya memakai kebaya dan dibesarkan seperti ibu-ibu mereka⁴. Pada umumnya kaum peranakan ini tidak berbicara bahasa Cina tetapi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat. Sebagian dari mereka terasimilasi ke dalam masyarakat setempat, tetapi terpisah dari golongan ras lainnya, terutama sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik pecah belah Belanda. Pada waktu itu terdapat tiga lapisan ras yang besar di Hindia Belanda (Indonesia), yaitu golongan (ras) Eropa yang menduduki tempat teratas, golongan Timar Asing (*Vreemde Oosterlingen* terutama Tionghoa) di lapisan tengah, serta golongan Indonesia pribumi (*Inlanders*). Pemerintah Kolonial Belanda merangsang setiap golongan ras untuk mempertahankan cara berpakaian dan adat istiadatnya.

Sistem hukum yang berlaku pada waktu itu juga memaksakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam berbagai cara. Misalnya, penetapan zona dan sistem surat jalan (*wijkenstelsel* dan *passenstelsel*) mewajibkan kepada pihak Tionghoa untuk tinggal/menetap di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dan melarang mereka untuk bepergian di luar wilayah tersebut, kecuali kalau mereka mempunyai kelengkapan dengan surat jalan. Pada akhirnya keluhan orang Tionghoa mencapai puncaknya menjelang akhir abad ke-19 ketika Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan politik etis yang salah satu efeknya menyerang kekuatan ekonomi

³ Pada tahun 1898 pemerintah kekaisaran Cina menghapuskan semua larangan mengenai kembalinya orang imigran Tionghoa ke negeri Tiongkok. Lihat Willmott, *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1960), hlm.24

⁴ Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 21

komunitas Tionghoa. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, nasionalisme Cina telah menyebar ke Jawa. Akibatnya secara perlahan telah mendorong orang Tionghoa di Jawa yang telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan mempunyai hubungan yang relatif tipis dengan negeri leluhur (Tiongkok), untuk meninjau kembali identitasnya. Yang jelas satu identifikasi baru dengan *nation* Cina timbul dan nasionalisme mulia tumbuh sebagai salah satu bentuk sentimen yang kuat di kalangan orang Tionghoa Indonesia.

Nasionalisme Cina pada awal abad ke-20 menyatakan diri dalam pembentukan organisasi-organisasi Cina Raya (Pan-Cina) seperti Tiong Hoa Hwee Koan (THHK, perhimpunan Tionghoa) yang mendirikan sekolah-sekolah dengan pengantarnya bahasa Cina di seluruh Jawa⁵. Pembentukan THHK kemudian diikuti dengan terbitnya surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya Li Po di Sukabumi (1901), Chabar Perniagaan di Batavia/Jakarta (1903), Djawa Tengah tahun 1909 di Semarang. Dengan demikian berdirinya THHK sebagai salah satu organisasi Cina Raya dan lahirnya surat-surat kabar Tionghoa merupakan produk dari nasionalisme Cina di Hindia Belanda. Setelah kemunculannya, sekolah THHK dan surat-surat kabar itu mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Cina Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda dan sekali gus mengarahkan orientasi kultural dan politiknya ke negeri Cina.

Gerakan Cina Raya menimbulkan kekawatiran penguasa Belanda. Pada tahun 1900 ketika THHK didirikan, Pemerintah Hindia Belanda juga mengimbanginya dengan mendirikan Biro Urusan Cina yang bertujuan untuk memberi nasehat kepada pemerintah atas politiknya terhadap komunitas Tionghoa. Pada tahun 1907 orang Tionghoa memperoleh status Eropa⁶, selanjutnya 1908 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Hollandsche Chineesche School* (HCS – Sekolah Cina Belanda), yaitu

⁵ Sekolah THHK merupakan pelopor dar pendidikan Tionghoa modern di Indonesia.

⁶ Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status Eropa termasuk pengetahuan berbicara bahasa Belanda, pemilikan sejumlah barang tertentu di kalangan anak-anak, dan wajib dinas militer. Suryadinata, *op.cit.* hlm. 25, 35.

sekolah berbahasa Belanda pertama untuk anak-anak Tionghoa menurut model sekolah Belanda untuk orang-orang Eropa. Yang jelas dalam perkembangannya politik kolonial Belanda terbukti efektif dalam menggalang kaum Tionghoa untuk berorientasi ke Hindia Belanda. Secara perlahan tetapi pasti anak-anak Tionghoa mulai memasuki sekolah-sekolah Belanda, sekali pun sekolah-sekolah THHK masih tetap populer

3.2. Gerakan Tionghoa Peranakan

Nasionalisme Indonesia yang lahir setelah pemberontakan komunis 1926 dan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) menandai dimulainya babakan baru dalam sejarah politik modern Indonesia. Salah satu ciri utama dari fase ini adalah bergemanya konsep *nation* atau kebangsaan Indonesia yang bersifat rasis masih tetap ada dalam wacana PNI. Dua contoh dapat disebutkan untuk menunjukkan bahwa para pemimpin PNI tidak menganggap Tionghoa peranakan sebagai orang Indonesia. Sementara contoh yang kedua adalah kasus Kwee Hong, seorang peranakan Tionghoa pemilik toko buku di Palembang dan telah mengambil prakarsa untuk mendirikan cabang PNI setempat. Berhubung dia adalah peranakan dan dianggap oleh anggota Indonesia lainnya sebagai orang Tionghoa, maka dia hanya bisa menjadi anggota luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar PNI. Ketika para pemimpin PNI ditahan oleh penguasa Belanda tahun 1930-an, Kwee Hong juga ditangkap tetapi segera dibebaskan.

Mungkin benar bahwa hanya beberapa orang peranakan Tionghoa saja yang berusaha masuk PNI. Sebagian besar dari mereka masih diilhami oleh nasionalisme Cina atau membatasi perhatiannya pada kepentingan-kepentingan kelompok mereka sendiri, dan bersikap pesimis terhadap gerakan nasionalis Indonesia. Banyak alasannya, tetapi kecenderungan rasial dalam gerakan itu merupakan satu alasan penting. Anehnya, kebangkitan gagasan Asia Raya pada waktu itu juga menekankan pemisahan antara orang Tionghoa dengan orang pribumi Indonesia. Pan-Asianisme

tersebar luas, baik di kalangan kaum nasionalis sekuler maupun di kalangan kaum nasionalis Hindia Belanda pada akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an. Para anggota kedua kelompok melihat diri mereka sebagai orang Asia dan oleh karena itu mempunyai satu tujuan bersama, yaitu mengusir kekuatan-kekuatan Barat dari bumi Asia. Namun ironisnya, gagasan-gagasan demikian itu membantu mengabadikan pemisahan kedua kelompok tersebut sebab mereka ternyata lebih memikirkan suatu persekutuan daripada penyatuan antara mereka.

Pada awal tahun 1930-an, para pemimpin Tionghoa peranakan seperti Liem Koen Hian dan Ko Kwat Tiong yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932, semakin percaya bahwa golongan Tionghoa peranakan harus menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan yang secara aktif berusaha untuk mengembangkannya. Mereka yang menempatkan kepentingan suatu negara asing di atas kepentingan Hindia Belanda tidak dapat disebut kawula negara Hindia⁷. Golongan Indo Belanda, Arab peranakan dan Tionghoa peranakan semuanya adalah bagian dari nasion Hindia.

Jalannya perdebatan rasialis pada waktu itu menunjukkan bahwa semua pers Pribumi yang berada ditangan kaum nasionalis Indonesia radikal yang dipengaruhi oleh Marxisme, menentang Liem Koen Hian, dan bahwa tantangan ini seringkali berasal dari prasangka dan ketidakpercayaan terhadap orang Tionghoa. Sekali pun demikian, perdebatan-perdebatan itu sendiri dan kegiatan golongan peranakan pada waktu itu dalam kehidupan politik Indonesia tampak telah menghasilkan pergeseran sikap. Partai Parindra yang berpengaruh setelah partai-partai nasionalis radikal ditindas pengasa Belanda pada awal tahun 1930-an mulai mempertimbangkan persoalan apakah akan membuka keanggotaannya bagi golongan Tionghoa peranakan. Suatu usulan untuk penerimaan keanggotaan seperti itu diajukan pada Kongres Parindra tahun 1937, tetapi sampai kongres berakhir belum ada keputusannya.

⁷ Suryadinata, *op.cit*, hlm.159

Pada kongres Parindra tahun 1938, partai memberikan peluang kepada golongan peranakan untuk menjadi anggota Parindra. Artinya Parindra dianjurkan bekerja sama dengan partai-partai peranakan seperti Partai Tionghoa Indonesia, tetapi tidak membuka kepada orang peranakan secara individual. Hampir satu tahun setelah Parindra menerima usulan tersebut, partai nasionalis Gerindo justru membuka keanggotaannya bagi golongan peranakan. Sebagai suatu partai sayap kiri, Gerindo berorientasi internasional. Gerindo justru percaya bahwa kemerdekaan Indonesia akan sangat tergantung pada situasi internasional. Untuk itu Gerindo memperbolehkan anggota-anggotanya bekerjasama dengan penguasa kolonial atas dasar ancaman Fasisme yang dipandang lebih besar daripada ancaman kolonialisme. Bahkan dalam kongres Gerindo di Palembang Amir Sjarifoeddin memberikan pembenaran bahwa Gerindo membuka pintunya kepada golongan peranakan atas dasar kaum nasionalis Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa semakin banyak orang peranakan yang berminat untuk menggabungkan diri kepada gerakan nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, pintu harus dibuka untuk mereka⁸

4. Simpulan

Sebelum gerakan nasionalis Tionghoa di Indonesia mencapai puncaknya, Pemerintah Kolonial Belanda sudah mengubah kebijakannya mengenai Tionghoa peranakan, dengan cara menghilangkan sebagian besar peraturan yang menggelisahkan golongan Tionghoa peranakan. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap golongan Tionghoa dan munculnya gerakan peranakan yang berpendidikan Belanda mendorong orang Tionghoa menganggap Indonesia itu sebagai tempat tinggalnya. Tionghoa peranakan yang memperoleh pendidikan Belanda kemudian membentuk Chung Hua Hui pada tahun 1928.

Golongan Tionghoa peranakan yang mengidentifikasikan diri dengan kaum nasionalis Indonesia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tahun 1932 dan

⁸ *Ibid*, hlm.164

menantang Chung Hua Hui. Oleh karena itu, golongan peranakan pecah menjadi tiga aliran politik. Pertama, kelompok Sin Po yang orientasi politiknya kiblat kepada negara Cina. Kedua, Chung Hua Hui dengan aliran politik yang berorientasi pada Pemerintah Kolonial Belanda. Ketiga, Partai Tionghoa Indonesia yang pro perjuangan kaum nasionalis memperjuangkan berdirinya negara RI. Ketiga kelompok politik saling bersaing satu sama lain dan berebut pengaruh.

5. Daftar Pustaka

- Hidayat, ZM. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung; Transito.
- Nio Joe Lan. 1961. *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Djakarta: Penerbit Keng Fo.
- Suryadinata, Leo. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Vasanty, Puspa “Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat. 1982. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta; Djambatan.
- Willmott, Donald E. 1960. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

